

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **.1 Latar Belakang Penelitian**

Sampai saat ini kondisi perekonomian di Indonesia belum sepenuhnya pulih. Pemerintah telah bertekad untuk melakukan langkah dan kebijaksanaan strategis, agar perekonomian nasional dapat semakin tumbuh dan berkembang secara wajar dan proporsional. Komitmen tersebut dilakukan dengan memprioritaskan pemberdayaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui wadah koperasi. Sebagai wadah pengembangan usaha, koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan sekaligus menumbuhkan semangat kehidupan demokrasi ekonomi dalam masyarakat.

Usaha koperasi disusun oleh anggota dan untuk anggota. Pimpinan dalam koperasi disebut pengurus yang dipilih oleh anggota dalam masa jabatan tertentu. Dikatakan bahwa koperasi tumbuh dari golongan lemah, bersatu guna memenuhi kebutuhan bersama. Usaha koperasi lebih banyak bersifat sosial menolong anggota dari pada motif yang mencari untung sebesar-besarnya. Tetapi saat ini motif koperasi sudah mulai bergeser dari usaha-usaha yang mementingkan sosial belaka, ke koperasi sebagai unit ekonomi yang harus memperhitungkan rugi dan laba. Koperasi sebagai salah satu bentuk usaha harus bisa mencari laba. Tanpa laba, maka koperasi tidak

akan pernah maju, karena tidak akan ada gairah anggota jika koperasinya selalu menderita kerugian.

Penjualan kredit dan kegiatan simpan pinjam merupakan beberapa aktivitas pokok dalam koperasi dan merupakan salah satu sumber bagi koperasi untuk mendapatkan profit yang memadai, sedangkan penerimaan piutang merupakan sumber bagi tersedianya modal kerja dan merupakan unsur yang paling penting dalam pengoperasian koperasi. Sehingga, kelancaran penerimaan piutang merupakan hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi kegiatan usaha suatu koperasi. Apabila pengelolaan kurang baik, maka koperasi akan mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, koperasi memerlukan penanganan yang lebih baik terhadap piutang.

Koperasi yang jumlah penjualan kredit dan kegiatan pinjaman bagi anggotanya cukup besar harus dapat mengendalikan piutangnya dengan baik, karena risiko yang terkandung di dalamnya cukup besar yaitu kemungkinan tidak tertagihnya piutang tepat pada waktunya ataupun kemungkinan tidak tepatnya jumlah dalam penerimaan piutang, sehingga koperasi dapat menderita kerugian. Dengan semakin luasnya kegiatan aktivitas piutang, maka menimbulkan banyak permasalahan yang dihadapi manajemen, oleh karena itu diperlukan suatu alat atau cara khusus untuk mengawasi aktivitas piutang pada koperasi, yaitu sistem pengendalian intern piutang. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik terhadap piutang, maka akan mempengaruhi kelancaran penerimaan piutang pada suatu koperasi.

Pengendalian yang baik dapat menekan sekecil mungkin atau menghindari terjadinya masalah-masalah tersebut sehingga bila terjadi hal yang demikian dapat diketahui dan diatasi dengan tepat.

Salah satu koperasi yang didalamnya terdapat kegiatan penjualan kredit dan juga terdapat kegiatan simpan pinjam yang dapat menimbulkan piutang adalah Koperasi Karyawan Omedata (KKO). Pada Koperasi Karyawan Omedata (KKO) terdapat 2 unit kegiatan usaha, yaitu Unit Simpan Pinjam (USP) Dan Unit Usaha Dagang (UUD). Masalah yang saat ini terjadi pada KKO adalah pada unit simpan pinjam, yaitu terdapat anggota yang meminta perpanjangan waktu untuk pelunasan piutang yang dapat menyebabkan kurang lancarnya penerimaan piutang. Hal ini disebabkan karena KKO menganut prinsip koperasi yaitu berlandaskan atas azas kekeluargaan, dimana anggota dapat meminta pertimbangan untuk mendapatkan perpanjangan waktu.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pengendalian intern khususnya mengenai piutang harus dapat di jalankan dengan baik dalam koperasi ini. Karena jika tidak demikian, maka aktivitas koperasi akan menurun dan jika dibiarkan berlarut-larut maka koperasi akan mengalami kebangkrutan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meninjau permasalahan mengenai sistem pengendalian intern piutang dan kelancaran penerimaan piutang. Untuk itu penulis melakukan penelitian atas sistem pengendalian intern piutang dan kelancaran penerimaan piutang pada Koperasi Karyawan Omedata (KKO).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Piutang Terhadap Kelancaran Penerimaan Piutang Pada Koperasi Karyawan Omedata (KKO)”**

## **.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah diatas maka perumusan masalah yang dikemukakan pada penulisan tugas akhir ini adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Piutang pada Koperasi Karyawan Omedata (KKO).
- 2) Bagaimana kelancaran penerimaan piutang dinilai dari rasio perputaran piutang pada Koperasi Karyawan Omedata (KKO).
- 3) Berapa besar pengaruh Sistem pengendalian Intern Piutang terhadap Kelancaran Penerimaan Piutang pada Koperasi Karyawan Omedata (KKO).

## **.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **.3.1 Maksud penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah di rumuskan sebelumnya, maka maksud dari penelitian ini adalah, mendeskripsikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Piutang pada Koperasi Karyawan Omedata (KKO), serta menjelaskan kelancaran penerimaan piutang pada Koperasi Karyawan Omedata (KKO).

### **.3.2 Tujuan penelitian**

Tujuan dari penulisan ini untuk memperoleh gambaran dari perumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan Sistem Pengendalian Intern Piutang pada Koperasi Karyawan Omedata (KKO).
- 2) Menjelaskan kelancaran penerimaan piutang dinilai dari rasio perputaran piutang pada Koperasi Karyawan Omedata (KKO).
- 3) Menunjukkan besar pengaruh Sistem pengendalian Intern Piutang terhadap Kelancaran Penerimaan Piutang pada Koperasi Karyawan Omedata (KKO).

### **.4 Kegunaan Penelitian**

Atas alasan diatas, maka diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi :

#### **a. Instansi akademik**

Bagi instansi akademik yaitu Universitas Pendidikan Indonesia, dimana hasil ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan yang di hasilkan untuk instansi akademik. Selain itu pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh penulis dan kaitannya dengan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis juga dapat untuk memperoleh masukan dan umpan balik guna memperbaiki dan mengembangkan kesesuaian pendidikan.

b. Bagi Koperasi Karyawan Omedata (KKO)

Dengan penelitian ini, Koperasi Karyawan Omedata (KKO) dapat mempertahankan ataupun meningkatkan pengendalian intern piutang khususnya mengenai pengaruhnya terhadap kelancaran penerimaan piutang.

c. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian diharapkan akan memberikan wawasan tentang ilmu pengetahuan yang diteliti, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara kegiatan dilapangan dengan teori yang ada.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang sistem pengendalian intern khususnya bidang sistem pengendalian intern piutang. Serta dapat dijadikan rujukan untuk meneruskan penelitian dengan objek penelitian yang sama.

## **.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam suatu koperasi dibutuhkan sistem pengendalian intern, yang bertujuan untuk membantu pencapaian tujuan koperasi melalui pelaksanaan seluruh prosedur dan metode yang menjadi unsur itu sendiri dan benar-benar sesuai. Hal ini tercermin dalam pengetahuan pengendalian intern menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) yang dikutip oleh Chairul Marom adalah sebagai berikut:

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua cara dan alat-alat yang dikoordinasikan dan dipergunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan

kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan menjaga agar kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.  
( Chairul Marom, 2000: 2)

Dikemukakan pula oleh Mulyadi bahwa “Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan (...)” (Mulyadi, 2001:164). Menjamin keamanan kekayaan dalam koperasi juga merupakan penjaminan atas keamanan piutang, dapat pula diartikan untuk menjamin kelancaran penerimaan piutang.

Kegiatan koperasi yang memerlukan sistem pengendalian intern yang baik adalah kegiatan penjualan kredit dan pinjaman dari anggota, karena dengan berlangsungnya kegiatan ini maka akan menimbulkan piutang bagi koperasi. Dengan semakin meningkatnya penjualan kredit dan pinjaman dari anggota, maka perkiraan piutang dalam neraca koperasi akan semakin besar. Ini dapat mempengaruhi kelancaran penerimaan piutang pada koperasi, karena semakin besar perkiraan piutang maka semakin besar pula bagian modal kerja yang kurang efektif dan dapat dikatakan kurang lancar.

Piutang termasuk kedalam aktiva lancar dalam laporan keuangan. Piutang diklasifikasikan kedalam aktiva lancar karena piutang yang dimiliki suatu koperasi diharapkan akan terealisasi dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan dari tanggal neraca.

Dalam suatu organisasi bisnis, khususnya koperasi diperlukan suatu pengendalian intern terhadap piutang yang baik, karena jika pengendalian intern terhadap piutang dapat berfungsi dengan baik, maka kegiatan koperasi dapat berjalan

dengan lancar dan tujuan pengendalian intern dapat tercapai. Dikemukakan oleh Mulyadi, unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern piutang sebagai berikut:

**Organisasi**

- a. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas.
- b. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.

**Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan**

- c. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan (*giro bilyet*).
- d. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi.
- e. Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (bagian piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur.

**Praktik yang sehat**

- f. Hasil penghitungan kas harus direkam dalam berita cara penghitungan kas disetor penuh ke bank dengan segera.
- g. Para penagih dan kasir harus diasuransikan (*fidelity bond insurance*)
- h. Kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan bagian kasa maupun di tangan penagih perusahaan) harus diasuransikan (*cash-in-safe* dan *cash-in-transit insurance*).

(Mulyadi, 2001:490-491)

Dalam unsur pokok sistem pengendalian intern piutang yang pertama yaitu organisasi, pengendalian dapat dilaksanakan dengan pemisahan tanggung jawab fungsional yang dilakukan manajemen dalam pengelolaan organisasi pada suatu koperasi, yaitu dengan adanya fungsi akuntansi terpisahkan dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas, ataupun fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi koperasi.

Pada unsur pokok sistem pengendalian intern piutang yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut.



Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi telaksananya transaksi dalam organisasi, maka dokumen harus memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh aktiva dikendalikan dengan pantas dan seluruh transaksi dicatat dengan benar.

Oleh karena itu, dalam perancangan dokumen dan catatan terdapat prinsip-prinsip relevan dan unsur pengendalian intern yang harus dipertimbangkan. Seperti dikemukakan oleh Mulyadi, sebagai berikut:

Dalam perancangan dokumen dan catatan, unsur pengendalian intern yang harus di pertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Perancangan dokumen bernomor urut cetak.
2. Pencatatan transaksi harus dilakukan pada saat transaksi terjadi, atau segera setelah transaksi terjadi.
3. Perancangan dokumen dan catatan harus cukup sederhana untuk menjamin kemudahan dalam pemahaman terhadap dokumen dan catatan tersebut.
4. Sedapat mungkin dokumen di rancang untuk memenuhi berbagai keperluan sekaligus.
5. Perancangan dokumen dan catatan yang mendorong pengisian data yang benar.

(Mulyadi, 2002:191)

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Dikemukakan oleh Mulyadi, bahwa terdapat beberapa cara yang umum ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat, yaitu:

1. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
2. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*).

3. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.
  4. Perputaran jabatan (*job rotation*).
  5. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
  6. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya.
  7. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.
- (Mulyadi, 2000:167)

Piutang yang dimiliki suatu koperasi mempunyai hubungan yang erat dengan volume penjualan kredit dan kegiatan pinjaman oleh anggota. Pada Koperasi Karyawan Omedata (KKO) terdapat aktivitas penjualan yang dilakukan secara kredit dan kegiatan pinjaman, yaitu biasanya terdapat tenggang waktu pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterima diawal.

Kolektibilitas / pengembalian piutang merupakan tahap setelah realisasi piutang diberikan dan pengembalian nilai pokok piutang. Keharusan mengembalikan piutang merupakan ketentuan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu kreditur (koperasi) dengan debitur (anggota), yang dituangkan dalam surat perjanjian piutang.

Setelah piutang dicairkan, akan terjadi beberapa kemungkinan dalam pengembaliannya, yaitu pengembalian sesuai dengan jadwal yang telah disepakati (piutang berjalan lancar), pengembalian yang menyimpang dari jadwal yang telah disepakati namun masih dapat diharapkan akan dilunasi (piutang tidak berjalan lancar), atau tidak dapat dibayar / dilunasi sampai saat jatuh tempo (kredit macet).

Untuk menilai kelancaran penerimaan piutang pada koperasi, dapat dilihat dari sejauh mana realisasi pengembalian piutang dibandingkan dengan sasaran/ rencana pengembalian itu sendiri, yang dapat dilihat dari aspek waktu pengembalian dan aspek nilai pengembalian piutang. Aspek waktu antara lain dapat diukur dari ketepatan waktu pengembalian piutang oleh anggota, kedisiplinan anggota dalam mematuhi jadwal pengembalian dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan waktu pengembalian piutang. Aspek nilai pengembalian piutang berupa ketepatan jumlah piutang pokok yang diterima koperasi, dapat dilihat dari besarnya piutang yang diberikan dibandingkan dengan besarnya piutang yang diterima.

Perputaran piutang memegang peranan penting terhadap jalannya usaha koperasi, karena lancarnya perputaran piutang dapat meningkatkan kegiatan usaha koperasi. Pengelolaan piutang merupakan hal yang sangat penting dalam koperasi, karena piutang merupakan harta yang dimiliki koperasi yang timbul karena penjualan kredit dan pemberian pinjaman kepada para anggotanya. hal ini juga berarti jika penagihan piutang lancar, maka perputaran uang akan lancar.

K Fred Skousen mengemukakan bahwa “Untuk menilai seberapa baik perusahaan dalam mengelola piutang, dapat digunakan metode perhitungan dua rasio, yaitu rasio perputaran piutang dan rata-rata periode penerimaan”. Maka dari itu, kelancaran penerimaan piutang dapat terlihat dengan besarnya rasio perputaran piutang dan dengan menilai rata-rata periode penerimaan piutang yang terjadi.

Rasio perputaran piutang adalah mencoba menentukan berapa lama dalam satu periode suatu perusahaan 'membalikkan' atau menerima kembali piutangnya. Rasio tersebut mengukur berapa lama piutang diterima dan diganti dengan piutang baru. Menurut K. Fred Skouse, dkk dalam bukunya "Akuntansi Keuangan", perputaran piutang usaha dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Perputaran Piutang} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata-rata PiuTang}}$$

(Skouse, et al, 2001:315)

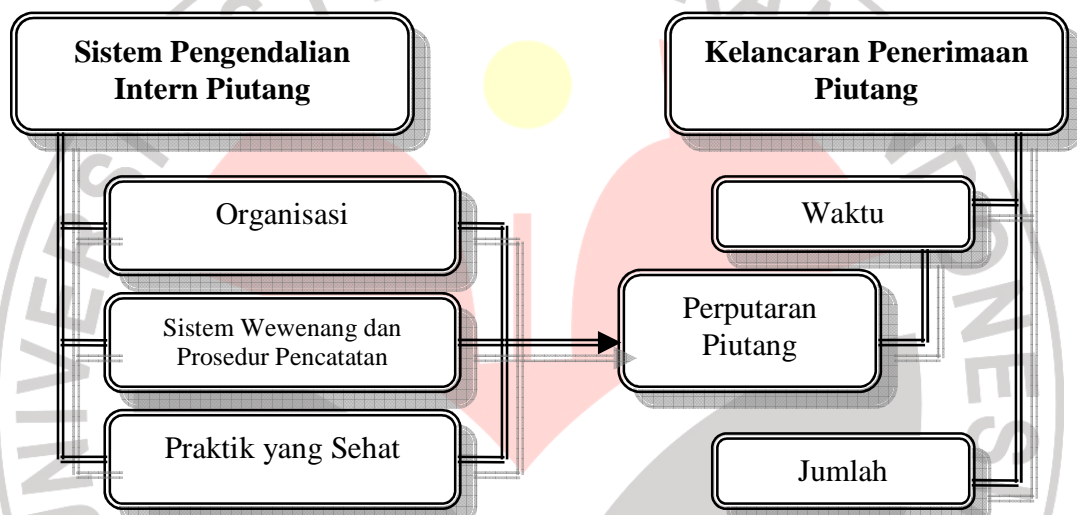
Sedangkan untuk mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk menerima piutang dihitung dengan membagi jumlah hari dalam satu periode akuntansi, dalam hal ini 183 hari (6 bulan) dengan perputaran piutang. Dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rata-Rata Periode Penerimaan} = \frac{183}{\text{Perputaran Piu tan g}}$$

Kebutuhan akan sistem pengendalian intern atas piutang tidak dapat dihindarkan lagi, sekalipun telah ditetapkan prosedur penjualan kredit dan penagihan dengan administrasi yang baik, hal ini masih belum menjamin adanya pengendalian atas piutang usaha apabila tidak diberlakukan suatu sistem pengendalian intern yang memadai. Dengan sistem pengendalian intern ini, segala tindakan kecurangan,

kelalaian dan kesalahan lain yang dapat merugikan koperasi dapat ditekan serendah mungkin.

**Gambar 1.1**  
**Paradigma Penelitian**  
**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Piutang terhadap**  
**Kelancaran Penerimaan Piutang**



#### .6 Asumsi

Dalam penelitian mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern Piutang terhadap Kelancaran Penerimaan Piutang, penulis mengasumsikan sebagai berikut:

1. Faktor ekstern koperasi yang berhubungan dengan sistem pengendalian intern piutang dan kelancaran penerimaan piutang dianggap konstan.

## .7 Hipotesis

“Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian dimana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut.” ( Ronny Kountur, 2003 : 93 )

Berdasarkan pengertian tersebut, untuk melihat seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Intern Piutang terhadap Kelancaran Penerimaan Piutang, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Intern Piutang berpengaruh positif terhadap Kelancaran Penerimaan Piutang”.

